

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN

HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sistem Informasi Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Sistem Informasi

Menurut Krismiaji (2011:4) sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan dan mengoperasikan bisnis.

Sutarman (2012:13) menyatakan sistem informasi akuntansi adalah mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu, terdiri atas input (data,intruksi) dan output (laporan,kalkulasi).

Azhar Susanto (2013:52) mengatakan bahwa sistem informasi adalah kumpulan sub-sub sistem baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan yaitu mengolah data menjadi informasi yang berguna.

Dari beberapa kutipan definisi sistem informasi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah kumpulan dari sub-sub sistem yang saling berhubungan serta bekerja sama untuk mendukung dalam pengambilan keputusan dan mengolah data menjadi informasi yang berguna.

2.1.1.2 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi digunakan dalam suatu organisasi untuk mengidentifikasi, menganalisa, menyimpan, merangkum, dan menyampaikan informasi ekonomi yang relevan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak eksternal maupun pihak internal organisasi. Beberapa ahli akuntansi mencoba mendefinisikan mengenai system informasi akuntansi.

Menurut Romney & Steinbart (2015:36) sistem informasi akuntansi adalah:

“... a system that collects, records, stores, and processes data to produce information for decision makers. AIS components include: people, procedures and instructions, data, software, information technology infrastructure, and internal controls and security measures.”

Dari kutipan di atas bisa diartikan bahwa sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Sistem ini meliputi orang, prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, serta pengendalian internal dan ukuran keamanan.

Mulyadi (2016:3) memberikan definisi terkait sistem informasi akuntansi yaitu, sistem informasi akuntansi merupakan organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.

Menurut Susanto (2002:112), sistem informasi akuntansi didefinisikan sebagai kumpulan dari subsistem-subsistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mengolah data keuangan menjadi

informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan di bidang keuangan.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah kumpulan dari suatu sumber daya yang terdiri dari manusia dan peralatan, yang di dalamnya terdapat data sebagai suatu input kemudian diolah menjadi output berupa informasi berbentuk suatu laporan keuangan yang kemudian dikomunikasikan kepada berbagai pihak untuk pengambilan keputusan.

2.1.1.3 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Berdasarkan pengertian sistem informasi akuntansi, sistem informasi akuntansi memiliki tujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan oleh para pembuat keputusan, bagi para pengguna sistem. Menurut Susanto (2013:8), tujuan sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut :

1. Mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari.
2. Mendukung proses pengambilan keputusan.
3. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada pihak eksternal.
4. Mengumpulkan dan memasukkan data transaksi ke dalam sistem informasi akuntansi.
5. Mengolah data transaksi.
6. Menyimpan data untuk tujuan di masa mendatang.
7. Memberi pemakai atau pemberi keputusan (manajemen) informasi yang mereka perlukan.
8. Mengontrol semua proses yang terjadi.

Adapun menurut Krismiaji (2011:37) yang terdiri dari tiga tujuan utama sistem informasi akuntansi menurut yaitu terdiri dari :

1. Menjamin bahwa informasi yang dihasilkan dapat dipercaya.

2. Menjamin bahwa aktivitas bisnis dilaksanakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan manajemen serta sejalan dengan peraturan yang telah digariskan.
3. Melindungi dan menjaga aktiva organisasi termasuk data lain yang dimiliki oleh perusahaan.

2.1.1.4 Manfaat Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Romney & Steinbart (2012:31) sistem informasi akuntansi (SIA) yang didesain dengan baik, dapat menambah nilai atau manfaat untuk organisasi, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa.
2. Meningkatkan efisiensi.
3. Berbagi pengetahuan.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokannya.
5. Meningkatkan struktur pengendalian internal.
6. Meningkatkan pengambilan keputusan.

Manfaat sistem informasi akuntansi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa.

SIA dapat memonitor mesin sehingga operator akan diberitahukan sesegera mungkin ketika kinerja berada di luar kualitas yang diterima.

2. Meningkatkan efisiensi.

Informasi yang tepat waktu membuat pendekatan manufaktur *just-in-time* menjadi memungkinkan, karena pendekatan ini membutuhkan informasi yang konstan, akurat, dan terbaru mengenai persediaan bahan baku dan lokasi mereka.

3. Berbagi pengetahuan.

Berbagi pengetahuan dan keahlian dapat meningkatkan operasi dan memberikan keunggulan kompetitif.

4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokannya.

SIA memungkinkan pelanggan untuk secara langsung mengakses persediaan dan sistem entri pesanan penjualan yang dapat mengurangi penjualan dan biaya pemasaran, sehingga meningkatkan tingkat retensi pelanggan.

5. Meningkatkan struktur pengendalian internal.

SIA dengan struktur pengendalian internal yang tepat dapat membantu melindungi sistem dari kecurangan, kesalahan, kegagalan sistem, dan bencana.

6. Meningkatkan pengambilan keputusan.

Peningkatan dalam pengambilan keputusan adalah hal yang sangat penting.

2.1.1.5 Pengguna Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi memberikan manfaat bagi penggunanya baik pengguna internal maupun pengguna eksternal sesuai dengan harapan dan kebutuhannya. Mardi (2011:11) menyebutkan pihak-pihak yang memanfaatkan sistem informasi akuntansi perusahaan terdiri dari :

1. Pihak internal perusahaan. Kelompok ini terdiri para manajer yang dalam kapasitasnya di perusahaan memerlukan informasi sesuai bentuk tugas dan tanggungjawabnya, membuat keputusan berdasarkan data dan informasi yang dihasilkan oleh SIA. Apabila informasi yang diperoleh dapat menunjang tugasnya, maka kinerja perusahaan akan meningkat.
2. Para pengguna internal meliputi pihak manajemen ditipa tingkat dalam perusahaan, serta personel operasional. Berdasarkan pada apa yang

dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Para desainer sistem, termasuk para akuntan, harus menyeimbangkan keinginan berbagai pengguna internal dengan sisi hukum dan ekonomi seperti pengendalian dan keamanan yang memadai, akuntabilitas yang memadai dan biaya untuk menyediakan berbagai bentuk alternative informasi.

Dapat disimpulkan bahwa pengguna sistem informasi akuntansi terdiri dari pengguna internal dan eksternal. Pengguna internal dalam pemerintah meliputi bendahara, kepala seksi, kepala bidang dan kepala dinas, sedangkan pengguna eksternal meliputi inspektorat, BPK dan Bank. Sistem informasi akuntansi harus memberikan nilai atau manfaat berdasarkan pada harapan atau kebutuhan para pengguna internal instansi pemerintah maupun pihak eksternal.

2.1.1.6 Komponen Sistem Informasi Akuntansi

Dalam rangka mencapai tujuan sistem informasi akuntansi yaitu memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan maka diperlukan unsur-unsur sistem informasi akuntansi yang terdiri dari beberapa unsur pokok seperti yang dikemukakan oleh Romney & Steinbart (2015:36) yaitu terdiri dari :

1. *People.*
2. *Procedures and instructions.*
3. *Data.*
4. *Software*
5. *Infrastructure of information technology*
6. *Internal controls and security measures*

Komponen-komponen sistem informasi akuntansi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *People*

Orang merupakan sumber daya yang terlibat dalam pembuatan sistem informasi, pengumpulan, pengolahan data, pendistribusian dan pemanfaatan informasi. Dengan demikian *people* merupakan orang-orang yang mengoperasikan sistem dan melakukan berbagai fungsi sistem informasi akuntansi.

2. *Procedures and instructions*

Prosedur merupakan rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam. Prosedur dalam hal ini baik prosedur manual maupun terkomputerisasi, yang dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas organisasi.

3. *Data.*

Data merupakan kumpulan data-data yang tersimpan di dalam media penyimpanan di suatu organisasi. Dengan demikian data dalam hal ini adalah ketersediaan data organisasi dan data aktivitas proses transaksi yang dilakukan organisasi

4. *Software*

Software (perangkat lunak), merupakan kumpulan program yang digunakan untuk menjalankan komputer, sedangkan program merupakan kumpulan perintah-perintah komputer yang tersusun secara sistematis. *Software* dipakai untuk memproses data organisasi.

5. Infrastruktur teknologi informasi

Infrastruktur teknologi informasi termasuk komputer, peralatan pendukung, dan peralatan komunikasi jaringan.

6. *Internal controls and security measures*

Internal controls and security measures merupakan aktivitas kontrol atas data dan upaya melindungi data dari sistem informasi akuntansi.

2.1.2 Sistem Pengendalian Internal

2.1.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Pengendalian internal merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu organisasi. Demikian pula instansi pemerintah mempunyai perhatian yang makin meningkat terhadap pengendalian internal, karena hal tersebut sangat mempengaruhi kegiatan operasional organisasi, sehingga organisasi memerlukan pengendalian internal yang baik dalam menjalankan tugasnya. Sebelumnya istilah yang dipakai untuk pengendalian internal adalah sistem pengendalian internal, sistem pengawasan internal dan struktur pengendalian internal. Mulai tahun 2001 istilah resmi yang digunakan IAI adalah pengendalian internal.

Pengertian sistem pengendalian internal menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Agoes (2012:100) adalah sebagai berikut:

“Pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”

Sistem Pengendalin Intern menurut *Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission (COSO)* 1992 dan “*Statement of Auditing Standard (SAS)*”⁷⁸ dalam Tugiman (2013:25), adalah :

“Suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel satuan usaha lainnya yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal-hal berikut: a) Efektivitas dan efisiensi operasi, b) Keandalan pelaporan keuangan, c) Kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.”

Pengertian sistem pengendalian intern menurut Permendagri No. 4 Tahun 2008 Pedoman Pelaksanaan Review Atas Laporan Keuangan Daerah Pasal 1(10) adalah :

“Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam penciptaan efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keandalan penyajian keuangan daerah.”

Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 1 adalah :

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yang terdiri dari keandalan laporan keuangan, efektif dan efisien.

2.1.2.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, tujuan sistem pengendalian internal pemerintah adalah :

1. Kegiatan yang efektif dan efisien
2. Laporan keuangan yang dapat di andalkan
3. Pengamanan aset negara
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Tujuan sistem pengendalian internal pemerintah di atas dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Kegiatan yang efektif dan efisien

Kegiatan pemerintah dikatakan efektif bila ditangani sesuai dengan rencana dan hasilnya telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan instansi pemerintah efisien bila mampu menghasilkan produksi yang berkualitas tinggi (pelayanan prima) dengan bahan baku (sumber daya) yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

2. Laporan keuangan yang dapat diandalkan

Agar keputusan yang diambil tepat sesuai dengan kebutuhan, maka informasi yang disajikan harus andal atau layak dipercaya, dengan pengertian dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Laporan yang tersaji tidak memadai dan tidak benar akan menyesatkan dan dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang salah serta merugikan organisasi.

3. Pengamanan aset negara

Aset negara diperoleh dengan membelanjakan uang yang berasal dari masyarakat terutama dari penerima pajak dan bukan pajak yang harus

dimanfaatkan untuk kepentingan negara. Upaya pengamanan aset ini, antara lain dapat ditunjukkan dengan kegiatan pengendalian seperti pembatasan akses pengguna aset, data dan informasi, penyediaan petugas keamanan, dan sebagainya.

4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Pelanggaran terhadap aspek hukum dapat mengakibatkan tindakan pidana maupun perdata berupa kerugian, misalnya berupa tuntutan oleh aparat maupun masyarakat. Keempat tujuan sistem pengendalian internal tersebut tidak perlu dicapai secara terpisah-pisah dan tidak harus dirancang secara terpisah untuk mencapai satu tujuan.

2.1.2.3 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008, bahwa unsur sistem pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintah di berbagai Negara yang meliputi :

- a. Lingkungan pengendalian
- b. Penilaian resiko
- c. Kegiatan pengendalian
- d. Informasi dan komunikasi
- e. Pemantauan pengendalian intern

Agar lebih jelas, berikut ini akan dijelaskan unsur-unsur dari pengendalian internal pemerintah tersebut :

1. Lingkungan Pengendalian

Tindakan, kebijakan, dan prosedur yang merefleksikan seluruh sikap top manajemen, dewan komisaris, dan pemilik entitas tentang pentingnya pengendalian dalam suatu entitas, yang mencakup:

a. Nilai integritas dan etika

Integritas dan nilai etika merupakan produk standar etika, perilaku organisasi dan bagaimana standar tersebut dikomunikasikan serta didorong untuk dilaksanakan. Standar tersebut mencakup tindakan-tindakan manajemen untuk menghindarkan diri atau mengurangi dorongan atau godaan yang mungkin mendorong seseorang untuk bertindak tidak jujur, melanggar hukum, atau tindakan lain yang tidak etis.

b. Komitmen terhadap kompetensi

Merupakan upaya untuk mencapai tujuan entitas, personil di setiap tingkat organisasi harus memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara efektif. Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen atas pengetahuan dan keterampilan diperlukan, paduan antara kecerdasan, latihan, dan pengalaman yang dituntut dalam pengembangan kompetensi.

c. Kepemimpinan yang kondusif

Pimpinan instansi pemerintah memiliki sikap yang selalu mempertimbangkan risiko dalam mengambil keputusan.

d. Memiliki stuktur organisasi

Merupakan kerangka kerja bagi manajemen dalam perencanaan, pengarahan, dan pengendalian organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi.

e. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab

Pembagian wewenang dan tanggung jawab merupakan bentuk komunikasi formal sehubungan dengan pengendalian atas masalah-masalah atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

2. Penilaian Risiko

Penilaian resiko adalah suatu proses dalam mengidentifikasi dan menganalisis resiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan organisasi dan menentukan respon yang sesuai dalam menghadapi resiko tersebut.

Penilaian risiko mencakup:

a. Identifikasi Resiko

Mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi.

b. Analisis Resiko

Menentukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh manajemen untuk mencapai tujuan laporan keuangan yang obyektif, yang mencakup:

- a) *Review* atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan;
- b) Pembinaan sumber daya manusia;
- c) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- d) *Review* atas indikator kinerja;
- e) Pemisahan fungsi;
- f) Otorisasi atas transaksi yang penting;
- g) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu
- h) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
- i) Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

4. Informasi dan komunikasi

Informasi dan komunikasi adalah komponen sistem pengendalian intern yang menghubungkan keempat komponen lainnya sehingga kelima komponen memiliki hubungan yang integral. Dalam hal ini pimpinan instansi pemerintah harus mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat secara efektif melalui :

- a) Menyediakan dan memanfaatkan sarana komunikasi.
- b) Mengembangkan sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan

Pemantauan adalah pengawasan oleh manajemen dan pegawai lain yang ditunjuk atas pelaksanaan tugas sebagai penilaian terhadap kualitas dan efektivitas sistem pengendalian intern. Monitoring terhadap sistem pengendalian intern bertujuan untuk meyakinkan bahwa pengendalian telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan diperbaiki sesuai dengan kebutuhan. Aspek monitoring mencakup :

- a) Penilaian kegiatan rutin, seperti supervise.
- b) *Review* atas transaksi yang terjadi guna memastikan apakah kegiatan operasional telah sesuai dengan sistem dan prosedur pengendalian yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian tersebut, pengendalian internal pemerintah dapat dikatakan sebagai suatu proses yang telah dirancang sedemikian rupa dengan memanfaatkan teknologi untuk mencapai tujuan yang diinginkan pemerintahan. Selain itu, pengendalian intern bermaksud untuk memberikan keyakinan atas pencapaiannya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2.1.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia

2.1.3.1 Pengertian Kompetensi

Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan. (PKBKN No.7 Tahun 2013).

Sedarmayanti (2011:126) mengemukakan bahwa kompetensi adalah karakteristik mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap kinerja, atau dapat memprediksikan kinerja yang sangat baik. Dengan kata lain kompetensi adalah apa yang *outstanding performers* lakukan lebih sering pada lebih banyak situasi, dengan hasil yang lebih baik dari pada apa yang dilakukan penilai kebijakan.

Menurut Sudarmanto (2014:45) kompetensi merupakan atribut untuk melakukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas atau unggul. Atribut mengacu kepada karakteristik tertentu yang diperlukan untuk dapat melakukan pekerjaan secara efektif. Oleh karenanya, atribut terdiri atas persyaratan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian atau karakteristik tertentu.

Menurut Moehariono (2014:5) kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya, efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu.

2.1.3.2 Pengertian Sumber Daya Manusia

Menurut Sutrisno (2010:3) sumber daya manusia adalah satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, pikiran, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya (rasio, rasa, dan karsa). Semua potensi tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Betapapun majunya teknologi, perkembangan informasi, tersediannya modal dan

memadainya bahan, jika tanpa SDM sulit bagi organisasi itu untuk mencapai tujuannya.

Menurut Nawawi (2012:1) pengertian sumber daya manusia adalah salah satu unsur dalam organisasi dapat diartikan sebagai manusia yang bekerja dalam suatu organisasi. SDM dapat disebut juga sebagai personil, tenaga kerja,pekerja, karyawan, potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Atau potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal non material dalam organisasi bisnis, yang dapat mewujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Menurut Wirawan (2015:1) pengertian sumber daya manusia adalah orang yang disebut sebagai manajer, pegawai, karyawan, buruh, atau tenaga kerja yang bekerja untuk organisasi. Sumber daya manusia merupakan dasar dan kunci dari semua sumber daya organisasi, efektivitas dan efisiensi sumber-sumber organisasi lainnya hanya dapat dicapai kalau sumber daya manusiannya berkualitas.

Menurut Wibowo (2016:180) pengertian sumber daya manusia adalah sumber daya manusia perlu memahami kecenderungan organisasi multicultural dan keberagaman kultural. Dengan demikian sumber daya manusia perlu memahami masalah dalam keragaman budaya.Keadaan tersebut membuat kompetensi sumber daya manusia semakin penting, baik bagi eksekutif, manajer maupun pekerja.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan sumber daya yang memiliki pengetahuan,

keterampilan, dan memiliki motivasi yang tinggi yang berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan.

2.1.3.3 Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 46A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia adalah sebagai berikut :

“Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.”

Sedarmayanti (2016:11) menjelaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan potensial yang dimiliki manusia, yang terdiri dari kemampuan berfikir, berkomunikasi, bertindak, dan bermoral untuk melaksanakan suatu kegiatan. Kemampuan yang dimiliki tersebut akan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku manusia dalam mencapai tujuan hidup, baik individual maupun bersama.

Menurut Mangkunegara (2012:40) kompetensi sumber daya manusia yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya.

Menurut Sudarmanto (2014:54) terdapat 7 determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi sumber daya manusia, yaitu :

1. Kepercayaan dan nilai.
2. Keahlian/keterampilan.

3. Pengalaman.
4. Karakteristik personal.
5. Motivasi.
6. Isu-isu emosional
7. Kapasitas intelektual.

Determinan pembentuk sumber daya manusia tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang.

1. Keahlian/keterampilan. Pengembangan keahlian khusus yang berhubungan dengan kompetensi dapat berdampak pada budaya perusahaan dan kompetensi individu.
2. Pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas.
3. Karakteristik personal. Kompetensi membangun hubungan dan komunikasi dengan tim kerja dari orang yang memiliki sifat *introvert* akan berbeda dengan orang yang memiliki sifat *ekstrovert*.
4. Motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai.
5. Isu-isu emosional, hambatan dan blok-blok emosional sering kali dapat membatasi penguasaan kompetensi.
6. Kapasitas intelektual. Kompetensi tergantung pada kemampuan kognitif, seperti berpikir konseptual dan berpikir analitis.

2.1.3.4 Karakteristik Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sudarmanto (2014:53) menyebutkan karakteristik kompetensi sumber daya manusia mencakup beberapa hal berikut :

1. Motif (*motive*)
2. Sifat (*traits*)
3. Konsep diri (*self-concept*)
4. Pengetahuan (*knowledge*)
5. Keterampilan (*skill*)

Karakteristik kompetensi sumber daya manusia tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Motif (*motive*), adalah hal-hal yang seseorang pikir atau inginkan secara konsisten yang menimbulkan tindakan. Motif akan mendorong, mengarahkan perilaku, terhadap tindakan atau tujuan tertentu.
2. Sifat (*traits*), adalah karakter fisik dan respon-respon konsisten terhadap situasi atau informasi.
3. Konsep diri (*self-concept*), adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Nilai yang dijunjung tinggi seseorang serta suatu sikap terhadap sesuatu yang ideal, dicita-citakan yang diwujudkan dalam pekerjaan atau kehidupannya.
4. Pengetahuan (*knowledge*), adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Sumber-sumber pengetahuan diperoleh dari hasil telaah (*study, learning*) dan pengalaman (*experience*) serta intuisi (*intuition*). Pengetahuan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan tugas tertentu melalui belajar. Belajar adalah mengaitkan secara

bersama-sama antara data dengan informasi, pengalaman, dan sikap yang dimiliki seseorang.

5. Keterampilan (*skill*), adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental. Kompetensi keterampilan mental atau kognitif meliputi, pemikiran analitis (memproses pengetahuan atau data, menentukan sebab dan pengaruh mengorganisasi data dan rencana) dan pemikiran konseptual.

2.1.3.5 Faktor yang Mempengaruhi Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi bukan merupakan kemampuan yang tidak dapat dipegaruhi.

Wibowo (2016:283) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecakapan kompetensi seseorang, yaitu :

1. Keyakinan dan nilai-nilai
2. Keterampilan
3. Pengalaman
4. Karakteristik kepribadian
5. Motivasi
6. Isu emosional
7. Kemampuan Intelektual
8. Budaya organisasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecakapan kompetensi seseorang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Keyakinan dan nilai-nilai

Keyakinan setiap orang harus berpikir positif baik tentang dirinya maupun terhadap orang lain dan menunjukkan ciri orang yang berpikir ke depan.

2. Keterampilan

Keterampilan memainkan peran di kebanyakan kompetensi. Berbicara di depan umum merupakan keterampilan yang dapat dipelajari, dipraktikkan, dan diperbaiki.

3. Pengalaman

Keahlian dari banyak kompetensi memerlukan pengalaman mengorganisasi orang, komunikasi dihadapan kelompok, menyelesaikan masalah, dan sebagainya.

4. Karakteristik kepribadian

Kepribadian termasuk dalam penyelesaian konflik, menunjukkan kepedulian interpersonal, kemampuan bekerja dalam tim, memberikan pengaruh dan membangun hubungan.

5. Motivasi

Motivasi memberikan dorongan, apresiasi terhadap pekerjaan bawahan, memberikan pengakuan dan perhatian individual dari atasan dapat mempunyai pengaruh positif terhadap motivasi seorang bawahan.

6. Isu emosional

Hambatan emosional dapat membatasi penguasaan kompetensi. Takut membuat kesalahan, menjadi malu, merasa tidak disukai atau tidak menjadi bagian, semua cenderung tidak membatasi motivasi dan inisiatif.

7. Kemampuan Intelektual

Kompetensi tergantung pada pemikiran kognitif seperti pemikiran konseptual dan pemikiran analitis. faktor seperti pengalaman dapat meningkatkan kecakapan dalam kompetensi ini.

8. Budaya organisasi

Budaya organisasi mempengaruhi kompetensi sumber daya manusia dalam kegiatan sebagai berikut :

- a. Praktik rekrutmen dan seleksi karyawan mempertimbangkan siapa diantara pekerja yang dimasukkan dalam organisasi dan tingkat keahlian tentang kompetensi.
- b. Sistem penghargaan mengkomunikasikan pada pekerja bagaimana organisasi menghargai kompetensi.
- c. Praktik pengambilan keputusan mempengaruhi kompetensi dalam memberdayakan orang lain, inisiatif, dan memotivasi orang lain.
- d. Filosofi organisasi isi, visi dan nilai-nilai berhubungan dengan semua kompetensi.
- e. Kebiasaan dan prosedur memberi informasi kepada pekerja tentang berapa banyak kompetensi yang diharapkan.
- f. Komitmen pada pelatihan dan pengembangan mengkomunikasikan tentang pembangunan berkelanjutan.
- g. Proses organisasional yang mengembangkan pemimpin secara langsung mempengaruhi kompetensi kepemimpinan.

2.1.3.6 Kategori Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Wibowo (2016:276) terdapat lima kategori kompetensi SDM, yaitu :

1. *Task achievement*
2. *Relationship*
3. *Personal attribute*
4. Manajerial
5. *Leadership*

Untuk lebih jelasnya katagori kompetensi seseorang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Task achievement*

Merupakan kategori kompetensi yang berhubungan dengan kinerja baik. Kompetensi yang berkaitan dengan *task achievement* ditunjukkan oleh: orientasi pada hasil, mengelola kinerja, mempengaruhi, inisiatif, efisiensi produksi, fleksibilitas, inovasi, peduli pada kualitas, perbaikan berkelanjutan, dan keahlian teknis.

2. *Relationship*

Merupakan kategori kompetensi yang berhubungan dengan komunikasi dan bekerja baik dengan orang lain dan memuaskan kebutuhannya. Kompetensi yang berhubungan dengan *relationship* meliputi kerja sama, orientasi pada pelayanan, hubungan, penyelesaian konflik, perhatian pada komunikasi dan sensitifitas lintas budaya.

3. *Personal attribute*

Merupakan kompetensi intrinsik individu dan menghubungkan bagaimana orang berpikir, merasa, belajar, dan berkembang. *Personal*

attribute merupakan kompetensi yang meliputi: integritas dan kejujuran, pengembangan diri, ketegasan, kualitas keputusan, manajemen stres, berpikir analitis, dan berpikir konseptual.

4. Manajerial

Merupakan kompetensi yang secara spesifik berkaitan dengan pengelolaan, pengawasan dan pengembangan orang. Kompetensi manajerial berupa memotivasi, memberdayakan, dan mengembangkan orang lain.

5. *Leadership*

Merupakan kompetensi yang berhubungan dengan memimpin organisasi dan orang untuk mencapai maksud, visi, dan tujuan organisasi. Kompetensi berkenaan dengan *leadership* meliputi kepemimpinan visioner, berpikir strategis, orientasi kewirausahaan, manajemen perusahaan, membangun komitmen organisasional, membangun focus dan maksud, dasar-dasar, nilai-nilai.

Sementara itu, Spencer (dalam Wibowo, 2016:277) menyusun beberapa *cluster* atau kelompok kompetensi ke dalam lima *cluster* sebagai berikut :

1. *Achievement dan action*
2. *Helping human service*
3. *Impact dan influence*
4. *Managerial*
5. *Cognitive*

Untuk lebih jelasnya *cluster* atau kelompok kompetensi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Achievement dan action*, merupakan *cluster* yang terdiri dari orientasi terhadap prestasi, perhatian terhadap order, kualitas dan akurasi, inisiatif dan pencarian informasi.
2. *Helping human service*, merupakan cluster yang terdiri dari pemahaman secara interpersonal dan orientasi terhadap pelayanan pelanggan.
3. *Impact dan influence*, merupakan *cluster* yang terdiri dari dampak dan pengaruh, kewaspadaan organisasi, dan membangun hubungan baik.
4. *Managerial*, merupakan *cluster* yang terdiri dari pengembangan orang lain, pengarahan, ketegasan dan penggunaan, kekuasaan berdasarkan posisi, *teamwork* dan kerja sama, *team leadership*.
5. *Cognitive*, merupakan *cluster* yang terdiri dari pemikiran analitis, pemikiran konseptual, keahlian teknis/professional/manajerial.

2.1.3.7 Dimensi Kompetensi Sumber Daya Manusia

Dimensi kompetensi sumber daya manusia menurut Sedarmayanti (2016:286), yang dilihat dari karakteristik kemampuan (*competency*) berdasarkan:

1. Pengetahuan (*knowledge*)
2. Keterampilan (*skill*)
3. Sikap (*attitude*)

Untuk lebih jelasnya karakteristik kemampuan (*competency*) tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengetahuan (*knowledge*), mencakup pengetahuan mengenai ilmu akuntansi keuangan dan ilmu pengetahuan lainnya yang terkait, pengetahuan mengenai kegiatan bisnis dan organisasi.
2. Keterampilan (*skill*), mencakup keterampilan teknis dan fungsional, keterampilan intelektual, keterampilan berorganisasi, keterampilan personal, keterampilan komunikasi dan intra personal.
3. Sikap (*attitude*), memiliki komitmen untuk kepentingan publik dan sensitifitas terhadap tanggung jawab sosial, pengembangan diri dan belajar serta terus menerus, dapat diandalkan, bertanggungjawab, tepat waktu dan saling menghargai, menaati hukum dan peraturan yang berlaku.

2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.4.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan daerah merupakan suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, pengertian laporan keuangan adalah :

“Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.”

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (SPAP) No.1 menjelaskan definisi laporan keuangan, yaitu :

“Sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan menjadi alat yang digunakan untuk menunjukkan capaian kinerja dan pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban dalam suatu entitas”.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (pasal 30-32), laporan keuangan pemerintah adalah :

“Media pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara oleh Presiden selaku kepala pemerintahan dan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara serta para gubernur/bupati/walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan pemerintah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan”.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah hasil dari proses pencatatan akuntansi yang ringkas berupa data keuangan dan aktivitas dari suatu perusahaan yang bertujuan untuk memberi gambaran mengenai kondisi keuangan, hasil usaha, serta kinerja perusahaan pada suatu periode tertentu.

2.1.4.2 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang disajikan oleh suatu entitas. Kualitas laporan keuangan daerah yang disajikan harus sesuai dengan standard akuntansi yang berlaku dan menampilkan suatu kualitas yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan.

Menurut Bastian (2010:9) pengertian kualitas laporan keuangan yaitu kualitas laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna dan berkualitas untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Menurut Rasdianto (2013:146) kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang disajikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan hasil akhir dari proses akuntansi dalam suatu pemerintah daerah yang menyajikan informasi yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan.

2.1.4.3 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pelaporan keuangan pemerintah daerah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, social, maupun politik. Menurut Tanjung (2014:12), tujuan laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Menyelesaikan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dalam kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional(LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) . Secara spesifik, tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan dan untuk menunjukkan

akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2.1.4.4 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah

Penjelasan komponen laporan keuangan pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/ daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan realisasi anggaran menyajikan

ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Neraca, menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas, pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.
4. Laporan Operasional (LO), menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam suatu periode.
5. Periode pelaporan, unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.
6. Laporan Arus Kas (LAK), menyajikan informasi kas sehubungan dengan menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/ daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.
7. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

8. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Laporan Arus Kas.

2.1.4.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan menurut Rukmi Juwita (2013) :

1. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Sistem Informasi Akuntansi.

Menurut Safrida Yuliani, Nadirsyah, dan Usman Bakar (2010) :

1. Pemahaman Akuntansi.
2. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah.
3. Peran Internal Audit.

Menurut Ida Ayu Enny Kiranayanti dan Ni Made Adi Erawati (2016) :

1. Sumber Daya Manusia.
2. Sistem Pengendalian Intern.
3. Pemahaman Basis Akrua.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah diantaranya yaitu Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Pengaruh Sumber Daya Manusia, dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

2.1.4.6 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga memenuhi tujuannya. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, empat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normative yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki :

- a. Relevan
- b. Andal
- c. Dapat dibandingkan, dan
- d. Dapat dipahami

Penjelasan karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Relevan, laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan, yaitu :
 - a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
 - b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.

2. Andal, informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesehatan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik :

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak

berbeda jauh, mengacu pada peraturan atau standard yang berlaku, lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.

c. Netralitas

Informasi yang tidak menguntungkan beberapa pihak yaitu instansi menyajikan informasi secara wajar agar tidak disalahgunakan untuk maksud tertentu dan informasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Mengandung unsur kehati-hatian yaitu informasi yang disajikan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan tertentu dalam penyusunan laporan keuangan, pertimbangan yang sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat mengambil keputusan. Informasi mengacu pada peraturan atau standard yang berlaku yaitu penyajian yang jujur, dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan mengacu pada peraturan dan standard yang berlaku. Lengkap dalam batasan materialitas dan biaya yaitu agar laporan keuangan dapat diandalkan, kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena tidak dapat diandalkan.

3. Dapat di bandingkan, informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.

4. Dapat dipahami, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya menggunakan beberapa referensi dari penelitian terdahulu yang bersumber dari beberapa skripsi dan jurnal ilmiah yang mempunyai hal serupa dengan penelitian ini dan menjadi bahan masukan atau bahan rujukan bagi penulis dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Safrida Yuliani, Nadirsyah, Usman Bakar (2010)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Intern Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan peran intern audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Daerah.
2	Rukmi Juwita (2013)	Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh implementasi standard akuntansi pemerintah dan sistem informasi akuntansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

3	Kartika Indriya (2013)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Keuangan	Sistem pengendalian intern pemerintah dan kualitas laporan keuangan berpengaruh sebesar 64,10% terhadap akuntabilitas keuangan, sedangkan sisanya sebesar 35,90% dipengaruhi oleh faktor lain. Sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan, sementara kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan.
4	Fadila Ariesta (2013)	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Internal Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD di Kabupaten Pasaman Barat)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Internal Audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
5	As Syifa Nurillah (2014)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok)	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
6	Liza Rahayu Kennedy (2014)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Pemerintah Provinsi Riau (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi SDM, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), dan Standar Akuntansi Pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
7	Desiana Anugerah Budiawan (2014)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kekuatan Koersif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh positif terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan Kekuatan Koersif berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

8	Dian Irma Diani (2014)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem informasi Akuntansi, dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD di Kota Pariaman)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Sistem Informasi Akuntansi, dan Peran Internal Audit berpengaruh signifikan positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pariaman.
9	Desy Sefri Yensi (2014)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
10	Dicky Rahman (2015)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
11	Suci Rahmadani (2015)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kab. Pasaman Barat)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi SDM, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
12	Nurendah Ragillita Untary (2015)	Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah Dengan Faktor Eksternal Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

		Daerah Kabupaten Magelang)	
13	Yusar Sagara (2015)	<i>The Effect of Implementation Accounting System and Competence of Human Resources on the Quality of Financial Reporting</i>	Penerapan sistem informasi akuntansi dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan secara simultan, implementasi sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
14	M. Ali Fikri (2016)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada SKPD di Pemprov. NTB)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur, dan Perat Audit Internal tidak berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan.
15	Yuli Artika (2016)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
16	Ida Ayu Enny Kiranayanti, Ni Made Adi Erawati (2016)	Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemahaman atas regulasi sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
17	Komalasari (2016)	Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada DPPKAD Kab. Subang)	Secara Parsial Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, dimana besarnya pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar 33,1% dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memberikan pengaruh 43,7% terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Secara simultan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal

			Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah 76,8% sedangkan sisanya 23,2% merupakan pengaruh faktor lain di luar variabel independen seperti kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi.
18	Dr. Gedion Alang Omwono, George Makokha N (2016)	<i>Influence of Internal Control System on Financial Reporting of Public Secondary Schools in West Pokot Country, Kenya</i>	Studi ini menemukan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh lebih besar terhadap pelaporan keuangan, karena sistem pengendalian internal memfasilitasi keandalan pelaporan keuangan.
19	Abdul Hakim (2017)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu)	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Artinya semakin baik Kompetensi Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang dijalankan oleh Pemerintah maka akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka pemikiran ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka pemikiran ini merupakan suatu argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis. Dalam merumuskan suatu hipotesis, argumentasi kerangka pemikiran menggunakan logika deduktif (untuk metode kauntitatif) dengan memakai pengetahuan ilmiah sebagai premis-premis dasarnya.

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan

untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah, kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintah dapat dipenuhi dengan baik apabila didasarkan pada basis akrual. Dari sisi manajemen perusahaan (internal) laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kerja manajerial dan organisasi sedangkan dari pihak eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang berguna bagi kepentingan pihak internal dan eksternal perusahaan harus disusun secara baik dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat dikatakan berkualitas.

2.2.1 Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hubungan sistem informasi akuntansi dan kualitas laporan keuangan juga didasarkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintah serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pengakuan munculnya hak dan kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata. Untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah diperlukan suatu sistem

akuntansi yang dapat mengakomodasi kebutuhan informasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan tersebut (BPKP, 2014:9).

2.2.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pengendalian Intern di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yaitu didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan tidak berjalannya pengendalian intern, banyak terjadi penyimpangan dan kebocoran yang ditemukan di dalam laporan keuangan, yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut belum memnuhi karakteristik/ nilai informasi yaitu keterandalan.

Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan keandalan pelaporan keuangan, menjaga kekayaan dan catatan organisasi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, efektivitas dan efisiensi operasi (Siti dan Ely, 2010:98).

Mahmudi (2010:27) menyatakan bahwa, untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui

yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan Desy Sefri Yensi (2014) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya apabila sistem pengendalian intern dilaksanakan dengan baik, maka seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan daerah akan berjalan dengan baik sehingga keuangan yang akan memberikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Enny Kiranayanti dan Ni Made Adi Erawati (2016) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan adanya sistem pengendalian intern yang baik, maka laporan keuangan pemerintah daerah akan dapat memenuhi karakteristik/ nilai informasi yang disyaratkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.2.3 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Edy Sutrisno (2010:8) menjelaskan bahwa sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, dorongan, pengetahuan, daya, dan karya (rasio, rasa, dan

karsa).Semua potensi SDM tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan.

Sumber daya manusia pengguna sistem dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk terus belajar. Kompetensi sumber daya manusia sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang bernilai (andal). Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Abdul Hafiz Tanjung (2011:6).

Manusia merupakan unsur yang sangat dominan dalam menghasilkan informasi yang berkualitas. Dikatakan dominan karena hanya bagian kecil peran yang dapat dilakukan oleh alat untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Misalnya suatu alat tidak dapat mengatakan bahwa informasi ini lengkap atau tidak.Alat juga tidak bisa mengatakan bahwa informasi yang relevan atau tidak. Azhar Susanto (2010:41).

Desy Sefri Yensi (2014) menyatakan bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Jika kompetensi sumber daya manusia (SDM) tidak sesuai dengan pendidikannya di luar akuntansi, maka akan berdampak terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sehingga, kualitas laporan keuangan tersebut menjadi tidak akurat karena tidak dikelola oleh SDM yang berlatar belakang pendidikan akuntansi.

2.2.4 Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang andal sesuai dengan standard akuntansi pemerintah (SAP) yang berlaku, sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan informasi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Desy Sefri Yensi (2014) melakukan penelitian kualitas laporan keuangan ditinjau dari kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan. Karena untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dipahami dan dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang andal, sumber daya manusia yang berkompeten seperti jumlah yang cukup serta memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, serta sistem pengendalian intern yang dilaksanakan secara optimal dan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang diteliti oleh Safrida Yuliani, Nadirsyah, Usman Bakar, 2010; As Syifa Nurillah, 2014; Suci Rahmadani, 2015; Dicky Rahman, 2015; Yuli Artika, 2016.

2. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi yang diteliti oleh Nurendah Ragillita Untary, Moh Didik Ardiyanto, 2015; Rukmi Juwita, 2013; Silviana, 2013.
3. Pemanfaatan Sistem informasi Akuntansi yang diteliti oleh Dian Irma Diani, 2014.

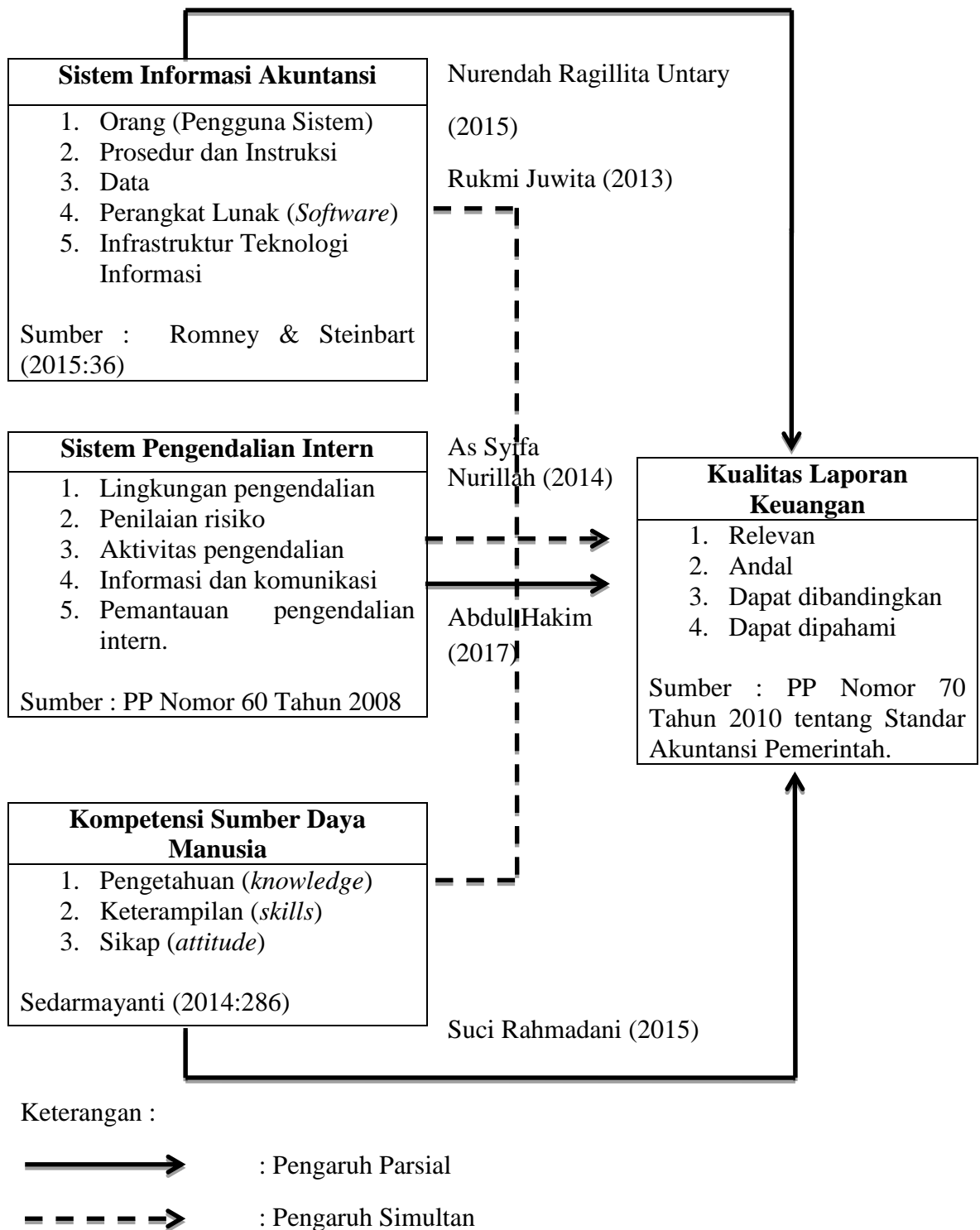
Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian internal adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal yang diteliti oleh kartika Indriya, 2013; Desiana Anugerah Budiawan, 2014; Tuti Herawati, 2014; Komalasari, 2016; Abdul Hakim, 2017.
2. Peran Audit Internal yang diteliti oleh M. Ali Fikri, 2016.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi sumber daya manusia adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia yang diteliti oleh As Syifa Nurillah, 2014; Liza Rahayu Kennedy, 2014; Suci Rahmadani, 2015; Abdul Hakim, 2017.
2. Kapasitas Sumber Daya Manusia yang diteliti oleh Yuli Artika, 2016.
3. Kualitas Sumber Daya Manusia yang diteliti oleh Fadila Ariesta, 2013.

Berikut kerangka pemikiran tentang penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Sugiyono (2016:63) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hipotesis adalah sebagai berikut :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang pasti.”

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka penulis merumuskan hipotesis yang merupakan perkiraan sementara dari penelitian sebagai berikut :

- H1 : Penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
- H2 : Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
- H3 : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
- H4 : Penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.